

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan cerminan dari hasil aktivitas tertentu. Seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), telah memotivasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2006).

Wujud pertanggungjawaban pemerintah, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan salah satu tujuan dari pemerintahan daerah yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga, upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus berkualitas, karena ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang di publikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan yang berbeda-beda. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, pengguna laporan keuangan pemerintahan antara lain: masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami sesuai dengan standart akuntansi Pemerintah. Apabila tidak sesuai dengan standart akuntansi Pemerintah, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Sukmaningrum, 2009). Kurang terpenuhinya karakteristik kualitatif pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah di karenakan kekurangan komitmen dari aparatur pemerintah dalam pengelola keuangan (Sitepu, 2014). Komitmen memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada dirinya (Setyowati, 2014). Kontribusi yang berarti dalam hal pengelolaan keuangan negara adalah menghasilkan laporan keuangan yang transparan untuk menyajikan dan mengungkapkan semua transaksi keuangan dan seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pemerintah dengan harapan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

LKPD yang belum mendapatkan opini WTP perlu perbaikan, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari aparat pemerintah daerah. Terkait opini LKPD, Opini WTP tidaklah dapat diperoleh secara instan dan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus diwujudkan melalui suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik. “Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik termasuk komitmen aparat pemerintah, (Fitrios, 2016). Komitmen dari pemerintah dapat memberikan pertanggungjawaban dan keandalan dari laporan keuangan.

Didukung juga dengan penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah dapat mencerminkan kualitas laporan keuangan (Setyowati, 2014). Selain, penerapan sistem akuntansi yang bagus peran internal audit pemerintah juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Peran Internal audit merupakan suatu peran aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi. Dengan demikian internal audit membantu dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan keuangan (Esstika dkk, 2016) peran internal audit untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Tambingon (2018) untuk mewujudkan integrasi kebijakan auditor internal pemerintah, maka pembinaan atas aparat bagian auditor

internal pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*) . Disamping itu, juga diperlukan pola pikir (*mind set*) sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, bahwa seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan Pengawasan Intern. Namun, yang terjadi di masyarakat yang menggambarkan pengelolaan keuangan belum berjalan sepenuhnya antara lain, tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya kebocoran anggaran yang timbul akibat praktek pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran belanja yang tersedia, sementara penerima anggaran harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Akibatnya penerima anggaran berusaha untuk memperoleh bukti transaksi guna mendukung pertanggungjawaban realisasi anggaran sebagai wujud akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah yang diragukan kebenarannya. Sehingga diperlukannya alat pengendali yang disebut dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Putra, 2017). Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Nur Yasin menjelaskan bahwa akar permasalahan rendahnya kualitas dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah kegagalan Kementerian, Lembaga Negara, BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Meida, 2017).

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menilai sejumlah Pemerintah Daerah di provinsi tidak serius dalam mengelola aset jika di lihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terlihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2017 di Provinsi Jawa Timur. Kemudian, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut mengungkapkan bahwa ada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) karena Pemerintah Daerah tersebut mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan LKPD. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya tingkat komitmen para aparatur pemerintah dan peran internal audit. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan dalam sistem informasi akuntansi dan ketidak patuhan terhadap standart akuntansi pemerintah yang terdiri dari, pencatatan belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sistem akuntansi yang terbaru.

Terdapat beberapa temuan BPK yang menilai temuan-temuan itu tidak sepenuhnya mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LHP atas LKPD TA 2017 pada 20 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Temuan dari BPK tersebut terhadap kabupaten Pamekasan adalah BPK menemukan adanya kelemahan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan tersebut tidak sepenuhnya mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Permasalahan yang pertama, pembayaran jeda konsultasi

perencanaan yang melebihi standar biaya yang ditetapkan kepala daerah, serta kekurangan volume dan kualitas atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal. Kedua, Pemerintah Kabupaten/Kota belum melakukan verifikasi dan validasi atas data Nomor Obyek Pajak (NOP), Dan wajib pajak PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang diterima dari Pemerintah pusat. Ketiga, Pengelolaan aset tetap masih kurang memadai. Keempat, terdapat pembayaran intensif pajak daerah tidak sesuai ketentuan. Kelima, pelaksanaan hibah baik uang maupun barang kurang memadai. Dan yang keenam, aplikasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya bisa diandalkan. Temuan tersebut dijadikan rekomendasi dari BPK terhadap kabupaten pamekasan. Tetapi tidak mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan laporan keuangan.

Hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang sangat penting yaitu peran internal audit pemerintah, kemampuan memanfaatkan teknologi dalam sistem informasi akuntansi juga penting. Pesatnya semakin berkembangnya sistem informasi akuntansi serta potensi pemanfaatannya secara luas, dapat memberikan kemudahan bagi para aparatur pemerintah untuk melakukan kegiatan dibidang keuangan (Fitrios, 2016). Menurut Defitri (2018) secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu sistem informasi akuntansi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyajian laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah.

Hasil Penelitian Defitri (2016) menyebutkan bahwa, pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi akan meningkatkan ketepatanwaktuan LKPD. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi akuntansi Keuangan Daerah, pemerintah berkewajiban memanfaatkan teknologi informasi. Pada Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Tambingon et. al (2018) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Komitmen aparatur dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan, dengan hasil bahwa Komitmen aparatur dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik komitmen aparatur pemerintah dan peran internal audit, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kusuma dkk, (2017) meneliti tentang pengaruh komitmen aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, dengan hasil komitmen aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Setyowati (2014) meneliti tentang peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan, dengan menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan belum sepenuhnya internal audit berperan didalamnya karena internal audit sebagai pemeriksa dan bukan sebagai penyusun atau pembuat laporan keuangan.

Yuliani dkk (2017) meneliti tentang pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, hasil penelitian menyatakan bahwa sistem informasi menjadi cermin dari kualitas laporan keuangan, jika kualitas laporan keuangan bagus maka sistem informasi akuntansi yang di terapkan bagus. Dari beberapa hasil penelitian diatas yang tidak konsisten maka

peneliti ingin meneliti kembali dengan variable-variabel yang sama dari beberapa peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pamekasan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti topik tersebut dan menjadikan penelitian Tambingon et.al (2018), Kusuma dkk (2017), Setiawati (2014) dan Yuliani (2017) sebagai rujukan. Maka judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Peran Internal audit, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Peran Internal Audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menguji secara empiris:

1. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Untuk mengetahui pengaruh Peran Internal Audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui komitmen organisasi pemerintah, peran internal audit, dan sistem informasi akuntansi, sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir dan menjadi bahan bagi pihak yang berkepentingan serta menambah literatur perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas, penelitian ini tidak dilakukan pada proses pelaporan keuangan, namun ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada pengujian terhadap tiga faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu komitmen organisasi, peran internal audit, dan sistem informasi akuntansi. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Pamekasan.